

# INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KOTA BANDA ACEH 2015



Batu Kali



Batu Bata



Genteng



Rangka Atap



Rp ?



Keramik



Besi



Kayu



Kaca



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BANDA ACEH**

---

# INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015

Katalog BPS : 7102025.1171  
Nomor Publikasi : 11714.1603  
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm  
Jumlah Halaman : vii + 57 halaman

## **Naskah:**

Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Banda Aceh

## **Gambar Kulit:**

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS  
Kota Banda Aceh

## **Diterbitkan Oleh:**

Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

*Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya*

---

**INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK)  
KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2015**

<http://bandaacehkota.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan potensi keuangan daerahnya masing-masing sebagai bagian dari perwujudan keberhasilan pembangunan nasional. Namun, ketersediaan dana sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan, dan oleh karenanya sumber pendapatan daerah kabupaten/kota yang utama adalah dari Dana Alokasi Umum (DAU).

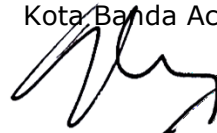
Agar pembagian DAU ke daerah Kabupaten/Kota menjadi adil, proporsional dan merata, diperlukan dukungan data dasar yang valid, akurat dan terkini. Kebutuhan fiskal yang dianggarkan melalui DAU dihitung berdasarkan beberapa komponen, salah satunya adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Dengan diterbitkannya publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Banda Aceh Tahun 2015 ini, diharapkan agar bahan perencanaan pembangunan bagi pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan demikian, pembangunan yang lebih baik dan terarah dapat diwujudkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan dan penerbitan publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Banda Aceh Tahun 2015. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan para pengguna data.

Banda Aceh, September 2016

Kepala Badan Pusat Statistik  
Kota Banda Aceh



**Surya Adi Taufik, S.Sos**  
NIP. 19590403 198003 1 003

---

# DAFTAR ISI

|  | Hal |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....   | iii |
| DAFTAR ISI .....   | iv  |
| DAFTAR TABEL.....  | v   |
| DAFTAR GAMBAR.....   | vi  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....  | vii |
| <br>   |     |
| BAB 1. PENDAHULUAN .....   | 1   |
| 1.1. Latar Belakang .....  | 3   |
| 1.2. Kegunaan .....  | 12  |
| <br>   |     |
| BAB 2. METODOLOGI .....  | 15  |
| 2.1. Ruang Lingkup .....   | 17  |
| 2.2. Metode Penghitungan.....  | 18  |
| 2.2.1. Penghitungan IKK 2015.....  | 18  |
| 2.2.2. Penghitungan Diagram Timbang IKK 2015.....                        | 20  |
| 2.3. Kegiatan Pengumpulan Data .....                                     | 32  |
| 2.4. Kuesioner yang Digunakan.....                                       | 33  |
| 2.5. Konsep dan Definisi .....   | 34  |
| <br>   |     |
| BAB 3. Statistik IKK .....   | 39  |
| 3.1. Keadaan Geografis.....  | 41  |
| 3.2. Penduduk .....  | 42  |
| 3.3. Keuangan Daerah .....   | 44  |
| 3.4. IKK Kota Banda Aceh Tahun 2015.....                                 | 46  |
| 3.5. Perbandingan IKK Kota Banda Aceh dengan<br>Kabupaten/Kota lain..... | 47  |
| <br>   |     |
| BAB 4. Penutup .....   | 53  |
| 4.1. Kesimpulan .....  | 55  |

---

## DAFTAR TABEL

|   | Hal |
|---|-----|
| Tabel 1. Beberapa Kemungkinan Penghitungan Celah Fiskal dan Dana Alokasi Umum .....                   | 11  |
| Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Banda Aceh, 2015 .                                      | 45  |
| Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2015..... | 46  |
| Tabel 4. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2015.....           | 48  |
| Tabel 5. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi di Indonesia, 2015.....                     | 49  |

---

## DAFTAR GAMBAR

|   | Hal |
|---|-----|
| Gambar 1. Komponen Dana Alokasi Umum Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 .....         | 5   |
| Gambar 2. Tahapan Formulasi Dana Alokasi Umum .....   | 10  |
| Gambar 3. Kategori Sektor Industri .....  | 21  |
| Gambar 4. Hubungan antara Proyek, Sistem dan Komponen.....                                    | 27  |
| Gambar 5. Peta Wilayah Kota Banda Aceh .....  | 42  |
| Gambar 6. Kepadatan Penduduk Kota Banda Aceh .....  | 44  |
| Gambar 7. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2015 ..... | 50  |

---

# DAFTAR LAMPIRAN

Hal

Lampiran 1. Contoh Kuesioner VIKK2015 ..... 57

<http://bandaacehkota.bps.go.id>



---

# **1. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

**1.2. Kegunaan**

<http://bandaacehkota.bps.go.id>

---

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan nasional Indonesia, dewasa ini pemerintah menempuh kebijakan Otonomi Daerah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah ketimpangan antar daerah melalui pemerataan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, sebagian besar urusan Pemerintahan Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, kedudukan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi sangat strategis. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada 1 Januari 2001, Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan potensi keuangan daerahnya sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selama beberapa tahun terakhir, DAU merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah, begitu juga untuk Kota Banda Aceh. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

---

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang valid, akurat dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional dan merata. Komponen Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari dua komponen yaitu Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF) dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### Rumus Formula DAU

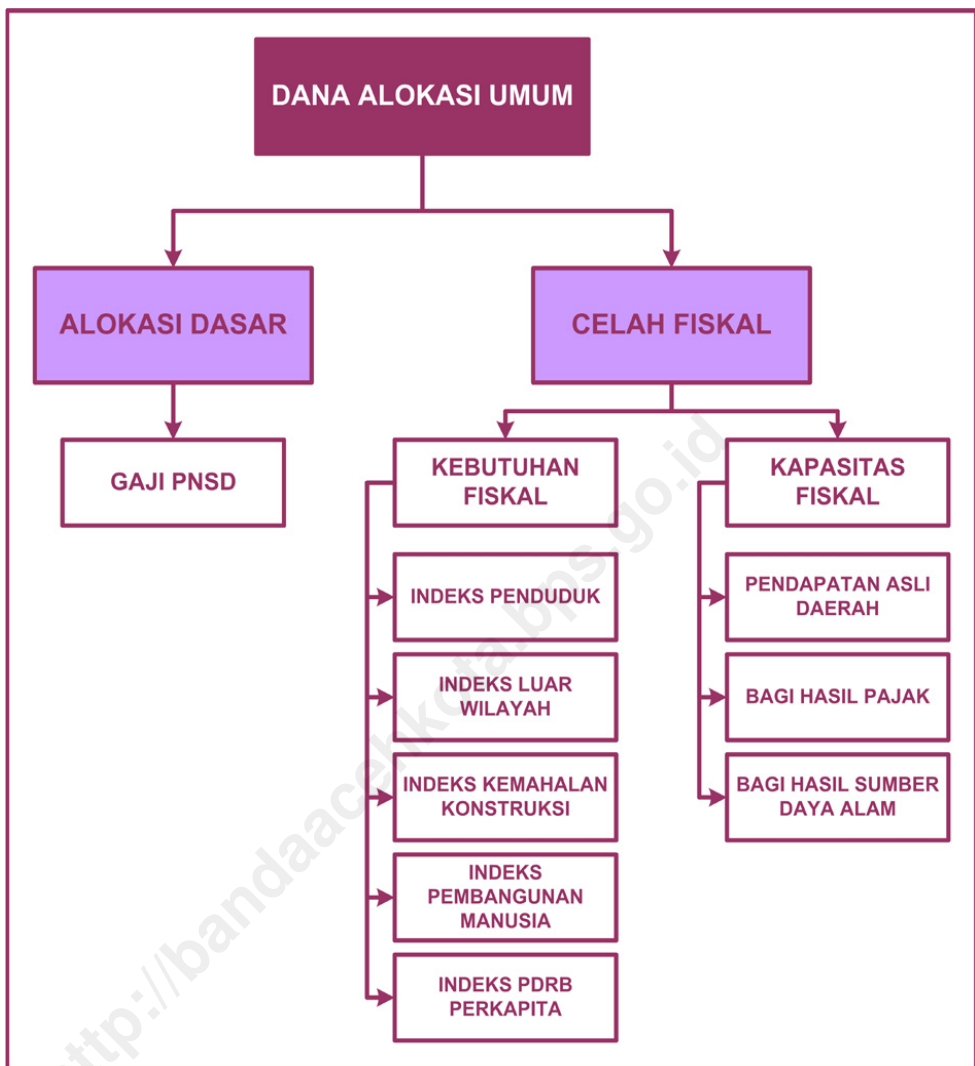
$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

dimana :

AD = Gaji PNS Daerah

CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Gambar 1. Komponen Dana Alokasi Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004



### Alokasi Dasar

Pada pasal 27 ayat 4 disebutkan bahwa Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Penghitungan Alokasi Dasar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 didasarkan atas :

- Realisasi Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah
- kenaikan gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan PPh pasal 21 dengan rata-rata 15%
- Kenaikan Tunjangan Jabatan Fungsional dan Struktural
- Tingkat Pertumbuhan (Accres) 2,5%
- Gaji Bulan ke-13
- Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pada UNDANG-UNDANG Nomor 33 tahun 2004, komponen belanja hanya belanja pegawai sipil daerah. Komponen belanja pegawai untuk masing-masing daerah (misal daerah A) dapat dirumuskan sebagai berikut;

$$\text{Alokasi DAU dari komponen belanja pegawai daerah A} = \frac{\text{Belanja pegawai daerah A}}{\text{Total belanja pegawai seluruh daerah}} \times \text{Total alokasi DAU dari komponen belanja pegawai}$$

---

## Celah Fiskal (CF)

Celah fiskal merupakan selisih dari **kebutuhan fiskal** dan **kapasitas/potensi fiskal** daerah tersebut.

## Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal daerah secara umum mengindikasikan perkiraan besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang diukur dengan variabel-variabel berikut :

1. Jumlah Penduduk
2. Luas Wilayah
3. Indeks Kemahalan Konstruksi
4. Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita
5. Indeks Pembangunan Manusia

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, maka dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan penyedia data untuk empat komponen (kecuali luas wilayah) dari lima komponen kebutuhan fiskal tersebut.

Jumlah penduduk mencerminkan tingkat kepadatan suatu wilayah dan menjadi penimbang bagi pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan. Konsep penduduk yang dimaksud adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama

---

6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan suatu wilayah yang direpresentasikan dalam tiga dimensi yaitu usia hidup (*longevity*) atau kesehatan, pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living standards*).

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh sektor ekonomi pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Besarnya nilai PDRB pada masing-masing sektor ekonomi menggambarkan sejauh mana ketergantungan suatu daerah terhadap salah satu sektor ekonomi. Selain itu, PDRB juga dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang dapat dilihat berdasarkan besarnya angka pertumbuhan ekonomi.

IKK adalah indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi/Harga Bangunan (TKK) suatu kabupaten/kota atau provinsi dengan TKK rata-rata nasional. IKK dapat mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur, dimana semakin sulit letak geografis suatu daerah maka harga bahan bangunan di daerah tersebut semakin tinggi. Perbedaan kondisi geografis dan jarak antar daerah menyebabkan terjadinya perbedaan pembiayaan dalam pembangunan tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar digunakannya Indeks Kemahalan Konstruksi

untuk penyesuaian kebutuhan daerah dilihat dari sektor bangunan/konstruksi.

Mengingat pentingnya ketersediaan data komponen penentu besarnya nilai DAU yang valid dan mutakhir, menjadi sangat krusial bagi setiap daerah termasuk Kota Banda Aceh untuk dapat menyajikan data keempat komponen tersebut, salah satunya adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Banda Aceh tahun 2015.

### **Kapasitas Fiskal**

Kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang mencerminkan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan, berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak
3. Dana Bagi Hasil (DBH) SDA

Pengalokasian DAU berdasarkan formula dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CF = \text{Kebutuhan Fiskal (K}_{bf}) - \text{Kapasitas Fiskal (K}_{pf})$$

$$K_{bf} = TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IPM + \alpha_4 IKK + \alpha_5 IPDRB/\text{kapita})$$

$$K_{pf} = PAD + DBH \text{ Pajak} + DBH \text{ SDA}$$

dimana:

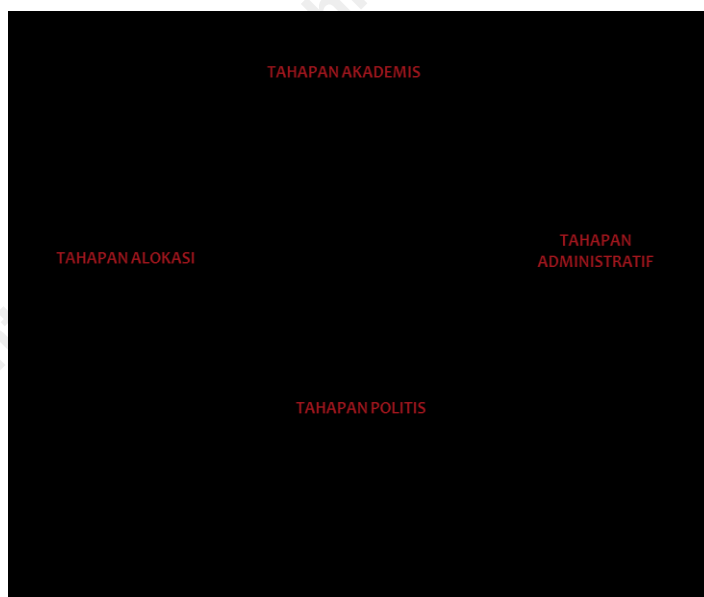
CF = Celah Fiskal

K<sub>bf</sub> = Kebutuhan Fiskal



|           |   |  |
|-----------|---|--|
| TBR       | = | Total Belanja Rata-Rata APBD                     |
| IP        | = | Indeks Jumlah Penduduk                           |
| IW        | = | Indeks Luas Wilayah (Depdagri dan Bakosurtanal)  |
| IPM       | = | Indeks Pembangunan Manusia                       |
| IKK       | = | Indeks Kemahalan Konstruksi                      |
| IPDRB     | = | Indeks PDRB Perkapita                            |
| $\alpha$  | = | Bobot Indeks                                     |
| Kpf       | = | Kapasitas Fiskal                                 |
| PAD       | = | Pendapatan Asli Daerah                           |
| DBH Pajak | = | Dana Bagi Hasil Pajak                            |
| DBH SDA   | = | Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber Daya Alam |

Gambar 2. Tahapan Formulasi Dana Alokasi Umum



Kebijakan *hold harmless* atau alokasi DAU yang tidak boleh lebih rendah dibandingkan DAU sebelumnya yang tidak berlaku lagi sejak tahun 2008 berdampak pada perolehan DAU yang sepenuhnya berdasar formula DAU (penghitungan DAU murni). Sehingga dalam mengatasi ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah, ada beberapa kemungkinan penghitungan celah fiskal maupun DAU.

Tabel 1. Beberapa Kemungkinan Penghitungan Celah Fiskal dan Dana Alokasi Umum

| ALTERNATIF | ALOKASI DASAR | CELAH FISKAL        | JUMLAH DAU |
|------------|---------------|---------------------|------------|
| (1)        | (2)           | (3)                 | (4)        |
| 1          | AD            | $>0$                | AD+CF      |
| 2          | AD            | 0                   | AD         |
| 3          | AD            | $<0$<br>$<AD$       | AD-CF      |
| 4          | AD            | $<0$ atau $\geq AD$ | 0          |

1. Apabila Celah Fiskal positif ( $CF > 0$ ) atau kebutuhan fiskal lebih besar dari pada kapasitas fiskal, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah dengan nilai Celah Fiskal.
2. Apabila Celah Fiskal sama dengan nol ( $CF = 0$ ) atau kebutuhan fiskal sama dengan kapasitas fiskal, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar.
3. Apabila Celah Fiskal negatif ( $CF < 0$ ) atau kebutuhan fiskal lebih kecil daripada kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal lebih kecil dari

---

alokasi dasar, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar dikurangi dengan nilai celah fiskal.

4. Apabila Celah Fiskal negatif ( $CF < 0$ ) atau kebutuhan fiskal lebih kecil daripada kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal sama atau lebih besar dari alokasi dasar, maka hasil penghitungan DAU adalah nol atau negatif. Untuk kasus negatif akan disesuaikan menjadi nol yang berarti daerah tidak menerima DAU.

## 1.2. Kegunaan

Dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintah hendaknya mampu melaksanakan pembangunan secara merata dan terarah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan kinerja pemerintah. Semakin baik kinerja pemerintah maka semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Banda Aceh tahun 2015 diharapkan dapat menjadi *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis Kota Banda Aceh, karena semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga barang konstruksi di daerah tersebut. Dengan demikian, sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan IKK bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu dilakukan analisis untuk melihat secara utuh berbagai aspek tentang IKK seperti:

- 
1. Metode penghitungan IKK 2015.
  2. Peranan IKK dalam menentukan Dana Alokasi Umum (DAU).
  3. Perbandingan IKK Kota Banda Aceh tahun 2015 terhadap kabupaten/kota secara Nasional.

Adapun maksud dan kegunaan pengukuran IKK Kota Banda Aceh tahun 2015 itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data dasar dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2015 dan utamanya digunakan sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal dalam penghitungan DAU untuk pengalokasian anggaran tahun 2015.
2. Sebagai alat ukur tingkat kemahalan harga bangunan dan perbandingan tingkat kesulitan geografis dengan kabupaten/kota lainnya.
3. Membantu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan konstruksi di Kota Banda Aceh.
4. Sebagai standarisasi harga khususnya barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan konstruksi, sehingga dapat ditentukan kewajaran suatu anggaran proyek oleh tim pembahas anggaran proyek.

---

# **2. METODOLOGI**

**2.1 Ruang Lingkup**

**2.2 Metode Penghitungan**

2.2.1. Penghitungan IKK

2.2.2. Penghitungan Diagram Timbang

IKK 2015

**2.3 Kegiatan Pengumpulan Data**

**2.4 Kuesioner yang Digunakan**

**2.5 Konsep dan Definisi**

<http://bandacehmeta.com/id>

---

## 2. METODOLOGI

### 2.1 Ruang Lingkup

Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis, karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model. Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metoda penghitungan, yaitu pertama dengan pendekatan input, dan kedua dengan pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metoda ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada pendekatan output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk manajemen cost dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

---

Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukan manajemen *cost* dan keuntungan kontraktor. Caranya adalah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada diatas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai. Dengan digunakannya realisasi APBD pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka setiap tahun IKK satu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota tahun 2015 mencakup 508 Kabupaten/ Kota, sedangkan IKK Provinsi dihitung di 34 Provinsi.

## **2.2 Metode Penghitungan**

### **2.2.1 Penghitungan IKK 2015**

Untuk menghitung indikator IKK ini dibutuhkan beberapa komponen antara lain data harga konstruksi yang meliputi harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat-alat berat konstruksi, upah jasa konstruksi, dan data bobot/diagram timbangan umum IKK

---

Kabupaten/Kota berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas dari 5 jenis bangunan. Survei ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk menyediakan data harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat-alat berat konstruksi, dan upah jasa konstruksi. Pada penghitungan IKK tahun 2015, Kota Surabaya dijadikan kota referensi dengan maksud supaya ada keterbandingan dengan IKK tahun sebelumnya. Untuk IKK tingkat provinsi data harga yang digunakan adalah rata-rata geometrik setiap komoditi dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi masing-masing dengan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi referensinya.

Misalkan  $p_{kn}$  adalah harga komponen konstruksi  $n$  di kabupaten  $k$  ( $k=1,2,\dots,K$ ;  $n=1,2,\dots,N$ ). Maka model statistik metoda Country Product Dummy (CPD) dituliskan sebagai

$$\begin{aligned}\ln p_{kn} &= \ln a_k + \ln b_n + \ln u_{kn} \\ &= a_k + \gamma_n + V_{kn}\end{aligned}$$

Parameter  $a_k$  diartikan sebagai tingkat harga konstruksi di kabupaten  $k$  relatif terhadap harga konstruksi di kabupaten lain yang sedang dibandingkan. Bila  $a_k$  adalah harga konstruksi di Kabupaten  $K$  relatif terhadap 1 (satu), yaitu harga di Kabupaten  $X$ . Dengan kata lain harga konstruksi di Kabupaten  $K$  setinggi  $a_k$  dibanding harga konstruksi di Kabupaten  $X$ . Karenanya IKK di Kabupaten  $K$  dinyatakan sebagai  $IKK_k$



---

=  $\exp(a_k)$ . Persamaan di atas dikalikan dengan 100 sehingga perbandingan data dinyatakan dalam persen.

## 2.2.2 Penghitungan Diagram Timbang IKK 2015

### Basket of Construction Components Approach (BOCC)

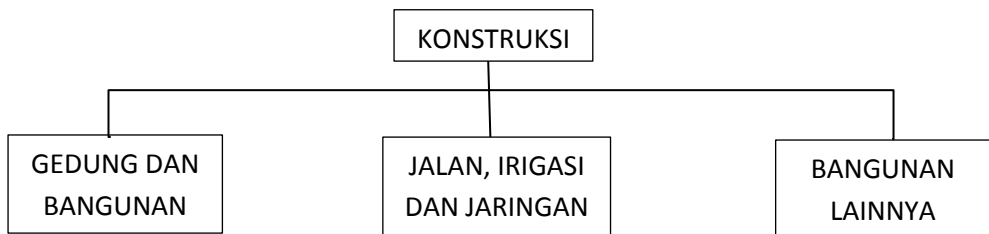
Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components Approach* (BOCC). Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BOQ).

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokkan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*.

Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut sebagai *basic heading* sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini,

Gambar 3. Kategori Sektor Industri



Gedung dan Bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun dan perumahan dinas.
2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental lainnya.

Klasifikasi jalan, irigasi dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah sebagai berikut:

1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
  - a. Bangunan Pengairan meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendungan (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase, irigasi, talang, *check dam*, tanggul

- 
- pengendalian banjir, tanggul laut, krib, waduk,
- b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan:
    - a. Pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, *drainase* jalan, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas.
    - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta meliputi pembangunan jalan dan jembatan kereta.
    - c. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan dan penahan gelombang.
  3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi
    - a. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, transmisi tegangan tinggi.
    - b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, bangunan antena.
    - c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
    - d. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral

- 
- telepon/telegraf, konstruksi menara pemancar radar *microwave*, bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit,
- e. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase pada gedung.
  - f. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
  - g. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan bukan tempat tinggal.
  - h. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api dan instalasi listrik lapangan udara.
  - i. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

Sedangkan jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya adalah sebagai berikut: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi *prefab* dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, dekorasi eksterior serta peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

## Sistem Konstruksi untuk Bangunan Rumah dan Gedung

| Nama Sistem                            | Penjelasan Sistem   |
|--|---|
| Site-work<br>(Persiapan)               | Sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan suatu proyek  |
| Substructure                           | Sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban bagian bangunan yang berada di atasnya seperti balok, atap dan lainnya |
| Superstructure                         | Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan diatas permukaan tanah. Sistem ini menahan beban bangunan di atasnya   |
| Exterior<br>Shell/Building<br>Envelope | Sistem yang berisi komponen konstruksi yang menyelimuti bangunan (atap). Bangunan ini memberi beban pada system superstructure pada bangunan  |
| Interior<br>Partitions                 | Sistem yang terdiri dari semua dinding dan bagian bangunan untuk jalan keluar masuk bangunan  |
| Interior and<br>Exterior<br>Finishes   | Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang bertujuan untuk memperindah bangunan, misalnya pengecatan   |
| Mechanical and<br>Plumbing             | Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang mengatur suhu, saluran air, komunikasi, sistem pemadam kebakaran dan lainnya  |
| Electrical                             | Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang berhubungan dengan distribusi listrik dalam sebuah bangunan   |

### Sistem Konstruksi untuk Jenis Bangunan Lainnya

| Nama Sistem              | Penjelasan Sistem   |
|--------------------------|---|
| Site-work<br>(Persiapan) | Sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan suatu proyek  |
| Substructure             | Sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban dari struktur/bagian bangunan yang berada di atasnya   |
| Superstructure           | Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan diatas permukaan tanah. Sistem ini menahan beban bangunan di atasnya   |
| Mechanical<br>Equipment  | Perlengkapan mekanik yang dipasang pada suatu bangunan seperti pompa, turbin, pipa penghubung, <i>tower</i> pendingin, dan lainnya  |
| Electrical<br>Equipment  | Peralatan yang terpasang pada bangunan yang digunakan untuk sistem distribusi tenaga listrik, distribusi panel, pusat kontrol pencahayaan, komunikasi dan lainnya   |
| Underground<br>Utility   | Jaringan bawah tanah, sistem atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi, menyimpan, transmisi dan distribusi komunikasi atau telekomunikasi, listrik, gas, minyak bumi, saluran pembuangan akhir, dan lainnya. Peralatan ini termasuk pipa, kabel, <i>fiber optic cable</i> , dan lainnya yang terpasang dibawah permukaan tanah |

---

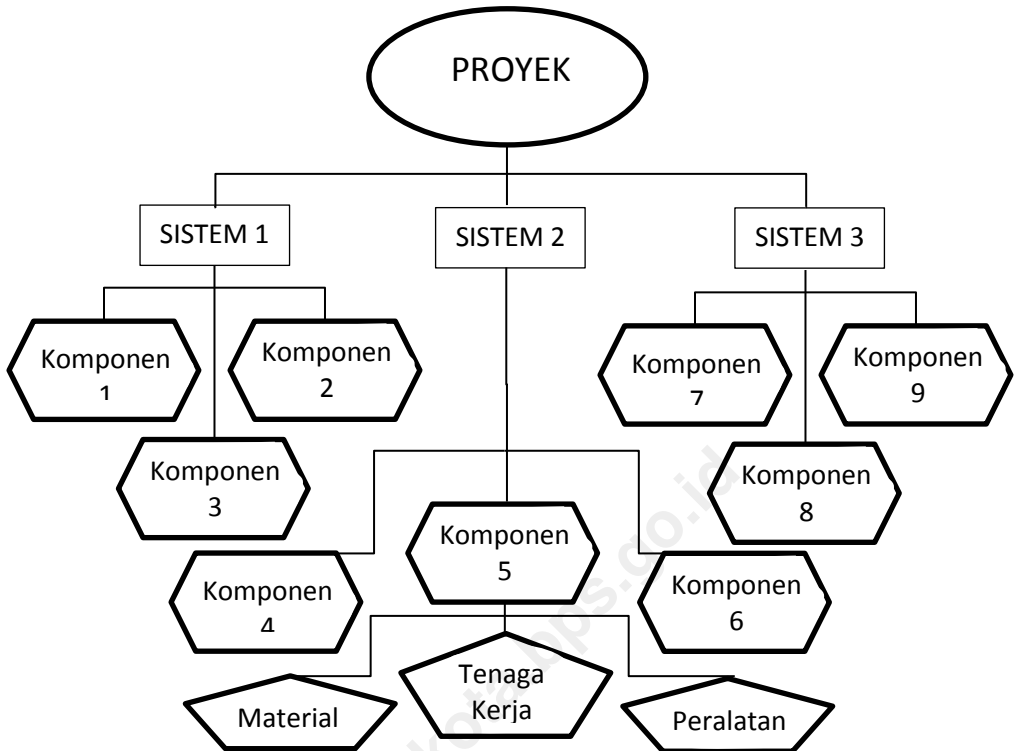
## **Komponen Konstruksi**

Komponen adalah kombinasi dari beberapa material pada lokasi akhir yang dapat diidentifikasi secara jelas pada tujuannya dalam sebuah proyek bangunan dan juga sistemnya. Contoh komponen adalah beton, pengecatan eksterior, pengecatan interior, pondasi kolom, dan lainnya. Sebuah komponen secara umum terdiri dari beberapa material, tenaga kerja dan peralatan.

Biaya masing-masing komponen disusun dari biaya per unit dari material yang digunakan dan perkiraan kuantitas dari material, koefisien dan upah tenaga kerja, koefisien dan sewa peralatan yang digunakan untuk membangun komponen tersebut. Konsep mendasar dari pendekatan BOCC adalah mengukur relatif harga pada level komponen konstruksi. Sebuah komponen kemudian dibagi-bagi kembali ke dalam beberapa item pekerjaan konstruksi. Komponen konstruksi dapat dianggap sebagai agregasi dari beberapa item pekerjaan konstruksi yang meliputi material, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan item pekerjaan tersebut.

Komponen-komponen yang digunakan dalam penghitungan diagram timbang IKK 2015 berbeda antara bangunan 1 (bangunan tempat tinggal), bangunan 2 (bangunan umum untuk pertanian, bangunan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan, bangunan umum untuk jaringan air, listrik dan komunikasi), bangunan 3 (bangunan lainnya).

Gambar 4. Hubungan antara Proyek, Sistem dan Komponen



Pendekatan BOCC menggunakan 3 sistem penimbang, yaitu:

1. W1 adalah penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, jaringan dan bangunan lainnya
2. W2 adalah penimbang untuk agregasi pada level sistem konstruksi
3. W3 adalah penimbang untuk agregasi pada level komponen yang termasuk upah tenaga kerja dan sewa peralatan



---

## Prosedur Penghitungan Penimbang

Langkah awal yang dilakukan untuk menghitung penimbang IKK adalah mengumpulkan *Bill of Quantity* (BoQ). Pengumpulan BoQ ini dilakukan melalui survei diagram timbang IKK yang lebih lengkap, yaitu menggunakan updating BoQ sampai tahun 2014. BoQ yang dikumpulkan dalam survei ini adalah BoQ realisasi pembangunan suatu konstruksi selama tahun 2015 di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Jika tidak ada pembangunan selama tahun 2015 maka bisa digantikan dengan BoQ dari pembangunan pada tahun 2014. BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing Kabupaten/Kota agar setiap Kabupaten/Kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Tahapan penghitungan diagram timbang dari data BoQ untuk masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

### 1. Pengkodean Data BoQ

Pengkodean merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan data BoQ. Terdapat beberapa macam kode yang diberikan, diantaranya:

- a. Melakukan pengkodean jenis bangunan dan kabupaten/kota untuk masing-masing jenis dokumen BoQ yang dikumpulkan.
- b. Melakukan pengkodean sistem pada setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ.



2. Menghitung *share* nilai untuk masing-masing tahapan penimbang (W1,W2, dan W3) setiap kabupaten/kota

a. Menghitung penimbang W1 setiap kabupaten/kota

Pada tahapan penimbang W1 dihitung *share* nilai setiap sistem untuk masing-masing bangunan.

**Nilai sistem** adalah jumlah nilai dari seluruh bahan bangunan, upah tenaga kerja, sewa peralatan yang digunakan dalam suatu sistem konstruksi. Penimbang W1 diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

$$W1_i = \frac{\text{Nilai Sistem}_i}{\sum_{i=1}^{n1} \text{Nilai Sistem}_i}$$

n1= 1,2,...,8 untuk bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal

n1= 1,2,...,6 untuk bangunan selainnya

b. Menghitung penimbang W2 setiap kabupaten/kota

Pada tahapan penimbang W2 dihitung *share* nilai setiap komponen untuk masing-masing sistem.

**Nilai komponen** adalah jumlah nilai dari seluruh bahan bangunan, upah tenaga kerja, sewa peralatan yang digunakan dalam sebuah komponen konstruksi. Penimbang W2 bisa diperoleh dengan rumus berikut:

$$W2_{ij} = W1_i \cdot \frac{\text{Nilai Komponen}_{ij}}{\sum_j^{n2} \text{Nilai Komponen}_{ij}}$$

n2 menunjukkan jumlah komponen dalam sistem yang bersangkutan.

c. Menghitung *share* untuk penimbang W3 setiap kabupaten/kota

Pada tahapan penimbang W3 dihitung *share* nilai setiap komoditi untuk masing-masing komponen. Penimbang W3 bisa diperoleh dengan rumus berikut:

$$W3_{ijk} = W2_{ij} \cdot \frac{\text{Nilai Komoditi}_{ijk}}{\sum_k^{n3} \text{Nilai Komponen}_{ij}}$$

n3 menunjukkan jumlah komoditi pada komponen yang bersangkutan. Dimana:

$$\sum_i^{n1} W_i = 1$$

$$\sum_i^{n1} \sum_j^{n2} W_{ij} = 1$$

$$\sum_i^{n1} \sum_j^{n2} \sum_k^{n3} W_{ijk} = 1$$

Selain sistem penimbang dengan menggunakan pendekatan BOCC, untuk menghitung IKK juga menggunakan penimbang umum (WO) yang digunakan sebagai penghubung masing-masing jenis bangunan menjadi suatu kesatuan konstruksi. Penimbang umum berasal dari realisasi anggaran kabupaten/kota untuk pembangunan konstruksi yang diperoleh melalui survei Keuangan

---

Pemda Tingkat II (K-II) dari Subdirektorat Keuangan dan Teknologi Informasi dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari data realisasi anggaran daerah tingkat II untuk pembangunan masing-masing jenis bangunan diperoleh bobot masing-masing jenis bangunan ke total konstruksi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

### **2.3 Kegiatan Pengumpulan Data**

Kegiatan pengumpulan data harga bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi ini mencakup :

1. Pengumpulan data harga bahan bangunan, harga sewa alat-alat berat yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota dari 34 Provinsi di Indonesia.
2. Jenis bahan bangunan/konstruksi yang dikumpulkan data harganya adalah jenis barang yang digunakan dalam kegiatan konstruksi seperti yang terangkum dalam kuesioner VIKK2015.
3. Harga sewa alat-alat berat konstruksi yang dikumpulkan adalah alat-alat berat yang biasa digunakan dalam kegiatan konstruksi seperti yang tertuang dalam kuesioner VIKK2015.
4. Upah jasa konstruksi meliputi upah per satuan/unit dan tunjangan lainnya dari mandor, kepala tukang, tukang batu, tukang kayu, tukang cat, tukang listrik, dan pembantu tukang.

- 
5. Responden survei IKK adalah pedagang grosir/distributor/pedagang yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor, dan kategori lainnya seperti: kontraktor, dinas PU atau instansi terkait lainnya (khusus untuk mengumpulkan data harga sewa alat-alat berat, upah pekerja konstruksi). Pemilihan responden dilakukan secara purposif dengan mengutamakan pedagang Grosir. Jika tidak ada pedagang Grosir maka dipilih responden dengan urutan skala prioritas yaitu produsen kemudian pedagang campuran (grosir melayani eceran). Khusus untuk responden pedagang campuran, yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar (grosir).
  6. Kegiatan pencacahan survei ini menggunakan 4 (empat) periode pencacahan, yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober 2015. Dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi sehingga lebih menggambarkan fluktuasi harga di bidang konstruksi.

## **2.4 Kuesioner yang Digunakan**

Untuk mengumpulkan data harga bahan bangunan, upah jasa konstruksi dan sewa alat berat digunakan 1 (satu) daftar pertanyaan yakni daftar VIKK2015. Daftar VIKK2015 digunakan masing-masing selama 4 (empat) periode pencacahan, yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober.

---

## Identifikasi Kualitas Barang

Agar hasil pengumpulan data harga sesuai dengan kebutuhan seperti yang tertuang dalam daftar VIKK2015, maka perlu dilakukan pemilihan kualitas sebagai berikut:

1. Kualitas terpilih harus sesuai ketentuan, yaitu kualitas yang biasanya (umum) ada dan digunakan di tiap-tiap kabupaten/kota dan tertulis dalam pilihan Daftar VIKK2015.

Contoh: Jenis barang: Kayu balok

Kualitas: kayu kelas I, kayu kelas II, dan seterusnya

3. Apabila kualitas jenis barang tidak tersedia dalam pilihan, maka pilih kualitas yang tersedia di pedagang dan dominan digunakan di kabupaten/kota bersangkutan dengan menggunakan satuan standar yang tertulis dalam daftar.

## 2.5 Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Harga perdagangan besar/grosir (HPB)** adalah harga **transaksi yang sudah terjadi** antara pedagang grosir sebagai penjual dengan pedagang berikutnya sebagai pembeli secara *party/grosir* atas suatu barang.

- 
2. **Harga produsen** adalah harga **transaksi yang sudah terjadi** antara produsen sebagai penjual dengan pedagang besar/distributor sebagai pembeli secara *party/grosir* atas suatu barang.
  3. **Harga eceran** adalah harga **transaksi yang sudah terjadi** antara pedagang sebagai penjual dengan **rumah tangga** sebagai pembeli yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga langsung, **bukan untuk ditransaksikan lagi** atas suatu barang.
  4. **Bahan bangunan/konstruksi** adalah material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan/konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.
  5. **Produsen** adalah pembuat/penghasil material baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan peralatan/mesin.
  6. **Pedagang grosir** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain atau kontraktor bangunan.
  7. **Pedagang campuran** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain, kontraktor bangunan, dan rumah tangga.
  8. **Kegiatan Konstruksi** adalah suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat



---

tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dimaksud dalam survei ini adalah hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi.

9. **Harga sewa alat berat konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, mingguan, atau bulanan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah unit/jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek dan juga tidak termasuk biaya jasa operator.
10. **Hidraulic Excavator** adalah suatu mesin alat berat yang berfungsi untuk menggali tanah dan menuangkannya ke tempat lain.
11. **Buldozer/Tracked Tractor** adalah alat berat yang berfungsi untuk menggusur/memindahkan (mendorong) tanah dalam jarak pendek.
12. **Skid Steer Loader** adalah sebuah loader dengan frame body kecil yang kaku dan kuat, mesin yang bertenaga dengan lift arm (lengan angkat) yang digunakan untuk memasang berbagai tools (peralatan) dan tambahan lainnya.

- 
13. **Tandem Vibrating Roller** adalah mesin penumbuk/pemadat jalan tipe tandem dengan penggerak roda belakang. Peralatan dilengkapi dua roda silindrical steel wheel (roda baja) dengan ukuran sama dan perangkat vibrator, sehingga alat ini juga berfungsi sebagai compactor.
14. **Compact Track Loader** adalah alat berat beroda karet, hanya mampu beroperasi di daerah yang keras dan rata.
15. **Dumptruck** adalah kendaraan angkut jarak jauh mempunyai bak angkut yang bisa diungkit secara hidrolis untuk menurunkan muatannya.
16. **Balas Jasa Konstruksi** adalah upah/gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada tenaga kerja di bidang konstruksi tiap satuan/unit orang/hari (O-H). Tunjangan lainnya yang dimaksud adalah semua pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja sektor konstruksi yang berupa makanan, perumahan/penginapan, jaminan sosial, dan sebagainya.
17. **Mandor** adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proyek dan berkoordinasi dengan kepala tukang. Pada pekerjaan yang lebih kecil, Mandor merangkap kepala tukang.
18. **Kepala Tukang**, adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas mengawasi dan membimbing buruh konstruksi untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan.

- 
19. **Tukang batu** adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas untuk memasang batu kali, batu bata, ubin, dan membuat plester tembok. Alat kerja yang digunakan biasanya adalah cetok, mal, dan water pass.
20. **Tukang kayu** adalah buruh konstruksi yang mempunyai tugas untuk membuat struktur bangunan dari kayu dan alat kerja yang digunakan biasanya adalah serut, gergaji, bor, pahat, dll.
21. **Tukang cat** adalah buruh konstruksi yang bekerja untuk mengecat tembok, papan, dan dinding lainnya.
22. **Tukang listrik** adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas memasang instalasi listrik & perlengkapannya dan memasang system listrik generator, trafo, dll.

---

## **3. STATISTIK IKK**

**3.1. Keadaan Geografis**

**3.2. Penduduk**

**3.3. Keuangan Daerah**

**3.4. IKK Kota Banda Aceh Tahun 2015**

**3.5. Perbandingan IKK Kota Banda Aceh  
dengan kabupaten/kota lain**

<http://bandaaceh.go.id>

---

## 3. STATISTIK IKK

### 3.1. Keadaan Geografis

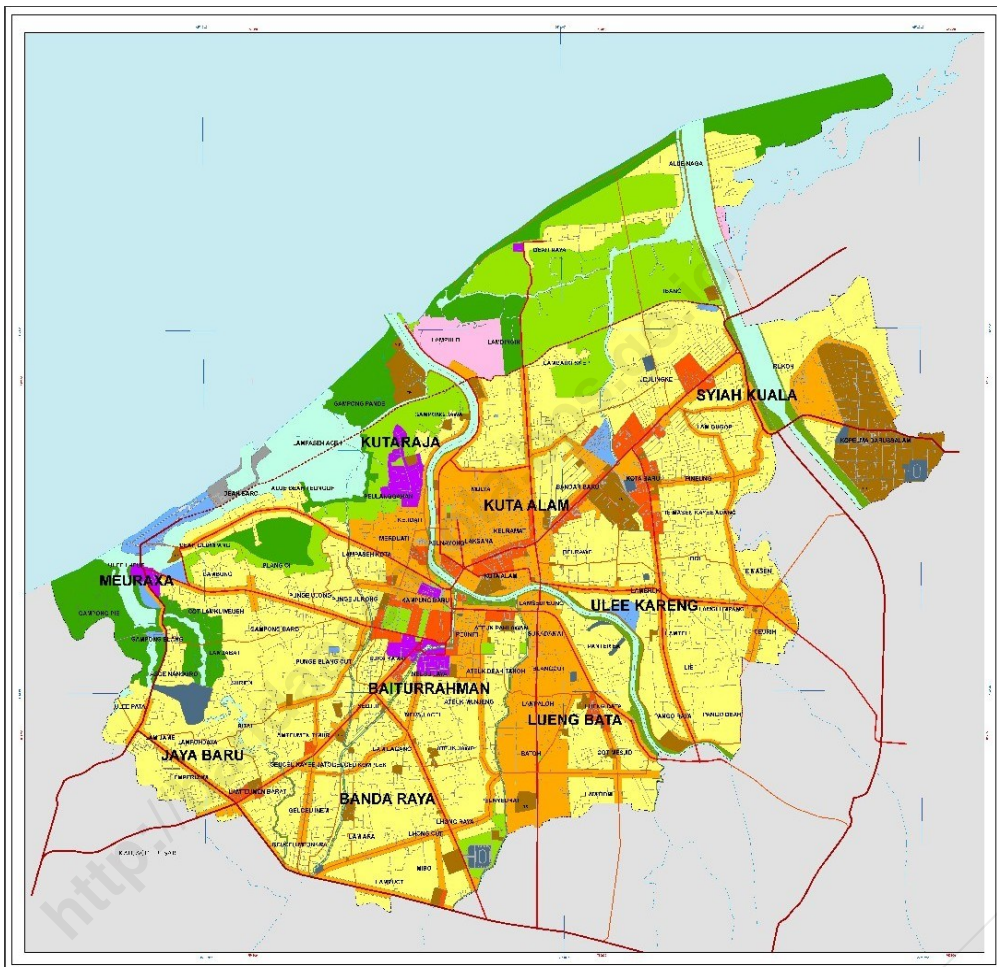
Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh terletak antara 050 16' 15" - 050 36' 16" Lintang Utara dan 950 16' 15" - 950 22' 35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah administratif Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau sekitar 61,36 Km<sup>2</sup>. Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan yang terbagi dalam 90 gampong (desa) serta 17 kemukiman. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Syiah Kuala (14,24 Km<sup>2</sup>), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Jaya Baru (3,78 Km<sup>2</sup>).

Wilayah Kota Banda Aceh dikelilingi oleh Kabupaten Aceh Besar yang merupakan batas wilayah Timur dan Selatan. Kota Banda Aceh berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah Utara dan Samudera Indonesia di sebelah Barat.

Tahun 2015, suhu udara rata-rata di Kota Banda Aceh berkisar 27,1<sup>0</sup>C, sedikit lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yang berkisar 27,0<sup>0</sup>C. Curah hujan rata-rata tahun 2015 sebesar 115,3 mm mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berkisar 135,3 mm. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 75 persen sampai dengan 85 persen, dengan rata-rata 80,2 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu

78,3 persen. Sedangkan kecepatan angin di Kota Banda Aceh rata-rata mencapai 5,3 knot.

Gambar 5. Peta Wilayah Kota Banda Aceh



### 3.2. Penduduk

Penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2015 sebanyak 250.303 jiwa yang terdiri dari 128.982 jiwa penduduk laki-laki dan 121.321 jiwa

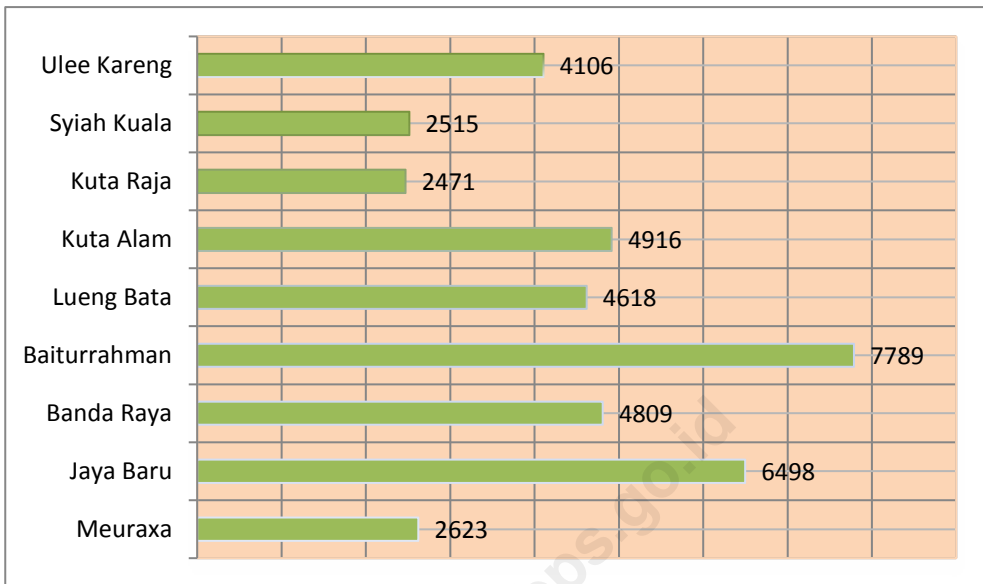
---

penduduk perempuan. Kota Banda Aceh mengalami penambahan penduduk sebesar 804 jiwa atau sekitar 0,32 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2014. Jumlah penduduk laki-laki secara umum lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh sex rasio yang nilainya lebih besar dari 100. Seperti halnya pada tahun 2014, maka pada tahun 2015 untuk setiap 106 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

Jumlah rumah tangga di Kota Banda Aceh ialah 61.641, dimana rumah tangga terbanyak terdapat di Kecamatan Kuta Alam yaitu 11.643, disusul oleh Kecamatan Syiah Kuala dengan jumlah 10.056 rumah tangga. Sementara itu jumlah rumah tangga paling sedikit terdapat di Kecamatan Kuta Raja sebanyak 3.299.

Kecamatan yang penduduknya terpadat ialah Kecamatan Baiturrahman yaitu 7.789 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan lainnya dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Jaya Baru dengan jumlah 6.498 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebaliknya kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang rendah masing-masing Kecamatan Meuraxa (2.614 jiwa/km<sup>2</sup>), Kecamatan Syiah Kuala (2.515 jiwa/km<sup>2</sup>), serta Kecamatan Kuta Raja memiliki kepadatan penduduk yang terendah yaitu 2.471 jiwa/km<sup>2</sup>.

Gambar 6. Kepadatan Penduduk Kota Banda Aceh



### 3.3. Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kondisi keuangan di daerah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi sumber pendapatan daerah sehingga tidak terlalu menggantungkan diri pada keuangan pemerintah pusat. Kenyataannya, hampir seluruh daerah di Indonesia masih menggantungkan diri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya.



Tabel 2. Realisasi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh, 2015

| No                              | Jenis Penerimaan                     | Jumlah                   |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| (1)                             | (2)                                  | (3)                      |
| <b>I.</b>                       | <b>Pendapatan Daerah</b>             | <b>1.217.566.428.915</b> |
| 1.                              | Pendapatan Asli Daerah               | 209.914.107.301          |
| 2.                              | Dana Perimbangan                     | 680.301.756.050          |
| 3.                              | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 327.350.565.564          |
| <b>II.</b>                      | <b>BELANJA DAERAH</b>                | <b>1.189.391.758.858</b> |
| 1.                              | Belanja Tak Langsung                 | 594.805.300.737          |
| 2.                              | Belanja Langsung                     | 594.586.458.121          |
| <b>III.</b>                     | <b>Pembiayaan</b>                    | <b>100.935.470.499</b>   |
| 1.                              | Penerimaan Pembiayaan                | 100.935.470.499          |
| 2.                              | Pengeluaran Pembiayaan               | 0                        |
| 3.                              | Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan  | 129.110.140.556          |
| <b>Jumlah Pendapatan Daerah</b> |                                      | <b>1.217.566.428.915</b> |

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh tahun 2015 sebesar Rp.209.914.107.301,-. Sementara itu, Dana Perimbangan Kota Banda Aceh tahun 2015 sebesar Rp.680.301.756.050,-. Pada tahun 2015, realisasi pajak bumi dan bangunan di Kota Banda Aceh adalah sebesar Rp.4.264.607.066,- atau 54,32 persen dari target yang diharapkan yaitu sebesar Rp.7.850.485.596,-. Rincian realisasi pajak bumi dan bangunan tiap kecamatan di Kota Banda Aceh dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2015

| Kecamatan     | Target               | Realisasi            | %            |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| (1)           | (2)                  | (3)                  | (4)          |
| Meuraxa       | 271.827.605          | 123.836.981          | 45,56        |
| Jaya Baru     | 445.745.889          | 243.350.903          | 54,59        |
| Banda Raya    | 709.061.143          | 355.240.927          | 50,10        |
| Baiturrahman  | 1.260.916.584        | 772.175.266          | 61,24        |
| Lueng Bata    | 1.041.430.109        | 478.351.211          | 45,93        |
| Kuta Alam     | 1.733.992.263        | 1.148.481.930        | 66,23        |
| Kuta Raja     | 210.709.533          | 133.607.305          | 63,41        |
| Syiah Kuala   | 1.262.402.397        | 624.537.785          | 49,47        |
| Ulee Kareng   | 914.400.073          | 385.024.758          | 42,11        |
| <b>Jumlah</b> | <b>7.850.485.596</b> | <b>4.264.607.066</b> | <b>54,32</b> |

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh

### 3.4. IKK Kota Banda Aceh Tahun 2015

Penghitungan IKK dilakukan pada setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Indonesia dengan menggunakan metode jenis barang dan jasa, serta waktu pencacahan yang sama sehingga hasilnya *comparable* untuk menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi antar wilayah se-Indonesia dalam kurun waktu yang sama.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2015 telah dihitung untuk 508 Kabupaten/Kota dari 34 Provinsi di Indonesia, termasuk di antaranya adalah IKK Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. IKK Kota Banda Aceh pada tahun 2015 sebesar 94,97 dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Aceh adalah 97,74. Adapun IKK rata-rata nasional adalah

---

sebesar 100 dimana Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai acuan (IKK Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur sama dengan 100). IKK Kota Banda Aceh pada tahun ini berada di bawah IKK rata-rata nasional, begitu pula IKK Provinsi Aceh yang juga berada di bawah IKK rata-rata nasional.

### **3.5. Perbandingan IKK Kota Banda Aceh dengan Kabupaten/Kota Lain**

Angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada tahun 2015 berkisar antara 78 sampai dengan 102. Berdasarkan level Provinsi Aceh, IKK Kabupaten Aceh Besar dengan nilai sebesar 78,59 adalah IKK dengan indeks terendah, sebaliknya posisi IKK tertinggi ialah Kota Lhokseumawe dengan nilai IKK 102,32. IKK Kota Banda Aceh sebesar 94,97 berada di urutan ke 15 dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh.

Sementara itu untuk level provinsi, bila diurutkan dari yang terendah, angka IKK Provinsi Aceh sebesar 97,74 menempati peringkat ke-8 dari 33 provinsi di Indonesia. IKK provinsi yang tertinggi adalah IKK Provinsi Papua sebesar 247,91 dan IKK terendah adalah IKK Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 91,80.

Tabel 4. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2015

| No  | Kode | Kabupaten/Kota  | IKK    |
|-----|------|-----------------|--------|
| (1) | (2)  | (3)             | (4)    |
| 1   | 1101 | Simeulue        | 97,66  |
| 2   | 1102 | Aceh Singkil    | 97,94  |
| 3   | 1103 | Aceh Selatan    | 90,89  |
| 4   | 1104 | Aceh Tenggara   | 90,83  |
| 5   | 1105 | Aceh Timur      | 91,37  |
| 6   | 1106 | Aceh Tengah     | 87,22  |
| 7   | 1107 | Aceh Barat      | 87,42  |
| 8   | 1108 | Aceh Besar      | 78,59  |
| 9   | 1109 | Pidie           | 86,78  |
| 10  | 1110 | Bireuen         | 89,49  |
| 11  | 1111 | Aceh Utara      | 98,72  |
| 12  | 1112 | Aceh Barat Daya | 93,40  |
| 13  | 1113 | Gayo Lues       | 98,00  |
| 14  | 1114 | Aceh Tamiang    | 90,98  |
| 15  | 1115 | Nagan Raya      | 100,30 |
| 16  | 1116 | Aceh Jaya       | 89,47  |
| 17  | 1117 | Bener Meriah    | 97,17  |
| 18  | 1118 | Pidie Jaya      | 82,87  |
| 19  | 1171 | Banda Aceh      | 94,97  |
| 20  | 1172 | Sabang          | 96,80  |
| 21  | 1173 | Langsa          | 93,65  |
| 22  | 1174 | Lhokseumawe     | 102,32 |
| 23  | 1175 | Subulussalam    | 88,11  |

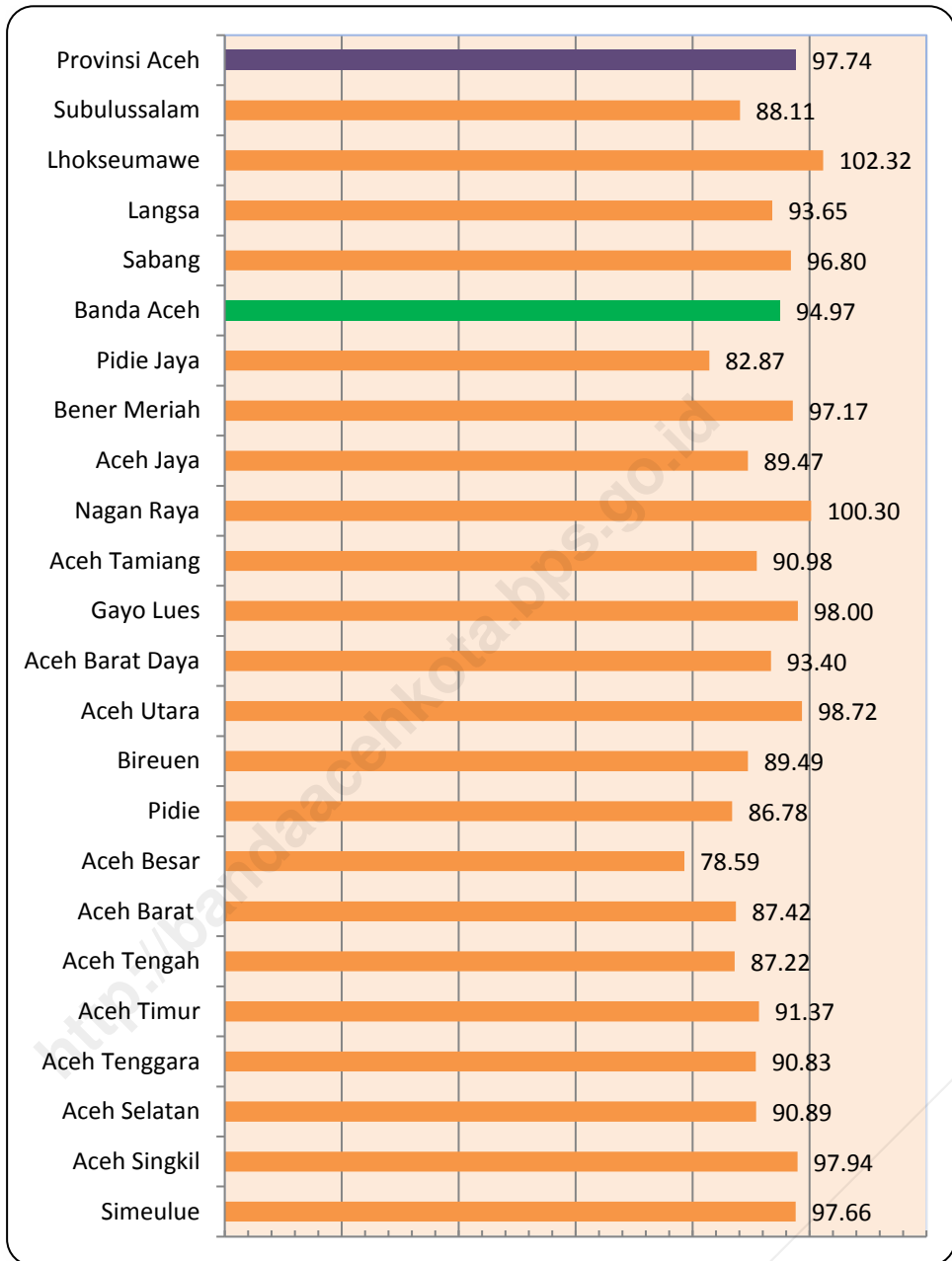
Sumber: BPS RI

Tabel 5. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi di Indonesia 2015

| No. | Provinsi             | IKK    |
|-----|----------------------|--------|
| 1   | Aceh                 | 97,74  |
| 2   | Sumatera Utara       | 102,54 |
| 3   | Sumatera Barat       | 103,01 |
| 4   | Riau                 | 104,97 |
| 5   | Jambi                | 96,64  |
| 6   | Sumatera Selatan     | 105,12 |
| 7   | Bengkulu             | 101,64 |
| 8   | Lampung              | 97,57  |
| 9   | Kep. Bangka Belitung | 104,90 |
| 10  | Kepulauan Riau       | 122,33 |
| 11  | DKI Jakarta          | 110,13 |
| 12  | Jawa Barat           | 101,09 |
| 13  | Jawa Tengah          | 95,99  |
| 14  | DI Yogyakarta        | 99,06  |
| 15  | Jawa Timur           | 100,00 |
| 16  | Banten               | 101,82 |
| 17  | Bali                 | 110,10 |
| 18  | Nusa Tenggara Barat  | 91,80  |
| 19  | Nusa Tenggara Timur  | 97,59  |
| 20  | Kalimantan Barat     | 118,87 |
| 21  | Kalimantan Tengah    | 110,99 |
| 22  | Kalimantan Selatan   | 102,92 |
| 23  | Kalimantan Timur     | 119,06 |
| 24  | Kalimantan Utara     | 129,56 |
| 25  | Sulawesi Utara       | 110,61 |
| 26  | Sulawesi Tengah      | 92,49  |
| 27  | Sulawesi Selatan     | 96,38  |
| 28  | Sulawesi Tenggara    | 105,85 |
| 29  | Gorontalo            | 103,05 |
| 30  | Sulawesi Barat       | 98,46  |
| 31  | Maluku               | 119,45 |
| 32  | Maluku Utara         | 125,78 |
| 33  | Papua Barat          | 146,01 |
| 34  | Papua                | 247,91 |

Sumber: BPS RI

Gambar 7. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2015



Sumber: BPS RI

---

Pada tahun 2015, hampir seluruh besaran IKK Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menunjukkan angka lebih rendah dari 100, hanya 2 Kabupaten/Kota yang memiliki IKK di atas 100 yaitu Kabupaten Nagan Raya dengan nilai IKK 100,30, dan Kota Lhokseumawe senilai 102,32. Disamping itu, angka IKK masing-masing Kabupaten/Kota yang berbeda-beda menunjukkan adanya variasi harga bangunan di masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh sebagai dampak dari lokasi yang sulit dan jauh dari pusat-pusat perekonomian.

Sebagai indeks spasial, besaran IKK lebih dipengaruhi oleh tingkat harga komoditas bahan bangunan antar daerah dibandingkan dengan perkembangan harga antar waktu (*time series*) di suatu daerah. Di daerah-daerah yang jauh dari pusat produksi atau pusat distribusi, harga komoditas pada umumnya lebih mahal. Dengan kata lain, perbedaan harga barang antar daerah berkaitan erat dengan darimana barang tersebut berasal. Sebagian besar barang-barang yang masuk ke Banda Aceh berasal dari wilayah Medan, Sumatera Utara dan beberapa barang berasal dari Banda Aceh sendiri, Aceh Besar dan Padang. Perbedaan harga antar daerah, selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti permintaan dan penawaran, juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti jumlah pedagang besar di daerah tersebut dan kondisi jalan yang mempengaruhi jalur distribusi.

---

# **4. PENUTUP**

## **4.1. Kesimpulan**

<http://bandaacehkota.bps.go.id>

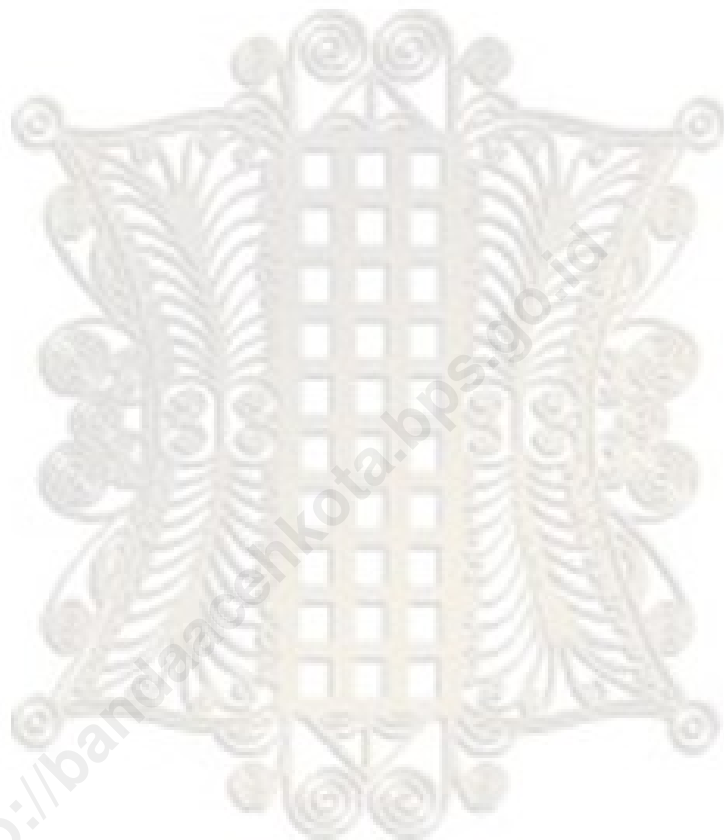


---

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2015 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Banda Aceh sebesar 94,97, lebih rendah dibandingkan IKK rata-rata nasional yaitu IKK Kota Surabaya yang besarnya 100,00.
2. IKK Kota Banda Aceh tahun 2015 berada pada posisi ke 15 dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
3. Untuk level provinsi, besaran IKK Provinsi Aceh berada di peringkat ke-8 terendah dari 34 Provinsi di Indonesia dimana yang menjadi provinsi acuan adalah Provinsi Jawa Timur.
4. Variasi angka IKK kabupaten/kota di Provinsi Aceh menunjukkan adanya perbedaan biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan luas pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.



<http://bandaacehkota.bps.go.id>



REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI SERENTAK HARGA BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI  
SEWA ALAT BERAT, DAN UPAH JASA KONSTRUKSI  
DALAM RANGKA PENGHITUNGAN IKK**

**PERIODE : OKTOBER 2015**

VIKK2015

**PENJELASAN**

1. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga material, dan produk yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan buku pedoman.
2. Responden adalah **pedagang grosir/distributor** yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/ pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran), atau pedagang eceran.
3. Responden harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari pengantinya yang sesuai.
4. Spesifikasi/kualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merek barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari **kualitas yang setara**.
5. Spesifikasi/kualitas barang setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas barang yang lama maka dicari pengganti yang setara.
6. Isian kuesioner dipindahkan ke komputer menggunakan program data entri dari BPS RI. Hasil entri dikirim ke shpb@bps.go.id dengan cc ke BPS Provinsi masing-masing.
7. Dilarang mengubah format file program data entri yang dikirim oleh SHPB.
8. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas pencacah dan pemeriksa disimpan di BPS Kabupaten/Kota untuk digunakan pada saat rekonsiliasi di BPS Provinsi.

**BLOK I : KETERANGAN TEMPAT**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Provinsi         | <input type="text"/> |
| 2. Kabupaten / Kota | <input type="text"/> |

**BLOK II : KETERANGAN PENCACAH DAN PENGAWAS**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama Pencacah               | 6. Nama Pengawas               |
| 2. NIP Pencacah                | 7. NIP Pengawas                |
| 3. Tanggal Pencacahan<br>..... | 8. Tanggal Pengawasan<br>..... |
| 5. Tanda Tangan<br>Pencacah    | 9. Tanda Tangan<br>Pengawas    |

























**BLOK III : DATA HARGA MATERIAL**

PRIORITAS RESPONDEN: 1. PEDAGANG GROSIR 2. PRODUSEN 3. PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4. PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

| Jenis Barang        | Kualitas Barang           | Responden | Satuan Standar | Merk | Satuan Setempat (buah, truk, dus, zak, lembar, rol, dll) | Ukuran Satuan setempat |           |            |            | Konversi satuan setempat ke satuan standar | Harga per satuan setempat (Rp) | Harga per satuan standar (Rp) | Nama responden (toko/pedagang) | Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll) |
|---------------------|---------------------------|-----------|----------------|------|--|------------------------|-----------|------------|------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
|                     |                           |           |                |      |  | Panjang (m)            | Lebar (m) | Tinggi (m) | Berat (kg) |  |                                |                               |                                |  |
| (1)                 | (2)                       | (3)       | (4)            | (5)  | (6)  | (7)                    | (8)       | (9)        | (10)       | (11)                                       | (12)                           | (13)                          | (14)                           | (15)   |
| Lampu               | Lampu SL (TL pendek) 20 W | I         | buah           |      |  |                        |           |            |            |  |                                |                               |                                |  |
| <b>PHILLIPS</b>     |                           | II        | buah           |      |  |                        |           |            |            |  |                                |                               |                                |  |
|                     |                           | III       | buah           |      |  |                        |           |            |            |  |                                |                               |                                |  |
| MCB (SPLN 108-1993) | 1 phasa 4 Ampere          | I         | buah           |      |  |                        |           |            |            |  |                                |                               |                                |  |
|                     |                           | II        | buah           |      |  |                        |           |            |            |  |                                |                               |                                |  |
|                     |                           | III       | buah           |      |  |                        |           |            |            |  |                                |                               |                                |  |
| <b>SCHNEIDER</b>    | 1 phasa 6 Ampere          | I         | buah           |      |  |                        |           |            |            |  |                                |                               |                                |  |
|                     |                           | II        | buah           |      |  |                        |           |            |            |  |                                |                               |                                |  |
|                     |                           | III       | buah           |      |  |                        |           |            |            |  |                                |                               |                                |  |
|                     | 1 phasa 10 Ampere         | I         | buah           |      |  |                        |           |            |            |  |                                |                               |                                |  |
|                     |                           | II        | buah           |      |  |                        |           |            |            |  |                                |                               |                                |  |
|                     |                           | III       | buah           |      |  |                        |           |            |            |  |                                |                               |                                |  |

**PENJELASAN PENGISIAN BLOK III**

**TANAH URUG, PASIR, BATU PONDASI, BATU SPLIT**

Satuan standar untuk barang-barang ini adalah m3. Jika harga yang diperoleh sudah dalam m3 maka isi kolom 7,8,9 dengan angka 1 dan isikan harga per m3 pada kolom 12. Jika satuan pencacahan tidak standar (truk, pick up) maka isikan panjang, lebar, dan tinggi bak yang terisi kemudian harga yang dicacah per satuan tsb pada kolom 12.

**BATU BATA, BATAKO**

Isikan ukuran batu bata/batako per buah yaitu: panjang, lebar, dan tinggi dalam meter kemudian tulis harga batu bata per buah pada kolom 12.

**SEMEN PORTLAND, CAT EMULSI**

Utamakan mencacah merk yang ditentukan. Isikan merk pada kolom 5, berat per kemasan di kolom 10, dan harga per kemasan pada kolom 12.

**BESI/BETON, PIPA PVC**

Utamakan mencacah merk yang ditentukan. Isikan panjang PIPA PVC atau BESI/BETON pada kolom 7 kemudian harga per batangnya pada kolom 12.

**KAYU BALOK, KAYU PAPAN**

Tuliskan jenis kayu pada kolom 5. Satuan standar kayu balok atau kayu papan adalah m3. Jika pencacahan barang tsb sudah dalam satuan m3 maka isikan kolom 7,8,9 dengan angka 1 kemudian isikan harga per m3 pada kolom 12. Jika kayu per lembar maka isikan panjang, lebar, dan tinggi kayu pada kolom 7-9. Isikan harga kayu per lembar pada kolom 12. Jika kayu per ton maka isikan kolom 11 dengan angka konversi dari ton ke m3 (1ton=...m3), sedangkan kolom 7-9 dikosongkan. Harga yang dicatat pada kolom 12 adalah harga kayu per ton.

**KACA, GYPSUM**

Utamakan mencacah merk yang ditentukan. Tuliskan merk pada kolom 5 kemudian isikan panjang dan lebar kaca/gypsum plafon per lembar (dalam meter) pada kolom 7,8. Tuliskan harga kaca/gypsum plafon per lembar pada kolom 12.

**KABEL**

Cacah harga kabel yang dijual per rol, bukan per meter. Isikan kolom 7 dengan panjang kabel per rol dan harga kabel per rol pada kolom 12.

**PENEGASAN PENCACAHAN IKK**

1. **PENCACAHAN HARGA UNTUK BARANG-BARANG NATURAL (PASIR, BATU PONDASI, BATU SPLIT, BATU BATA, BATAKO, KUSEN) DIPERBOLEHKAN DARI PRODUSEN YANG TIDAK BERADA DI IBUKOTA KABUPATEN/KOTA.**

2. **PENCACAHAN HARGA UNTUK BARANG-BARANG NATURAL TIDAK HARUS READY STOCK.**

3. **PEMILIHAN KUALITAS/SPEKIFIKASI BARANG HARUS SAMA SETIAP TRIWULANNYA.**

4. **UNTUK SEWA ALAT BERAT PADA BLOK 4, DI KOLOM KETERANGAN TULISKAN APAKAH HARGA SEWA MERUPAKAN HASIL KONVERSI ATAU TIDAK.**

**OKTOBER 2015****BLOK IV. DATA SEWA ALAT BERAT DAN UPAH PEKERJA KONSTRUKSI**

Responden: Jasa Penyewaan Alat Berat (umur alat berat maksimal 8 tahun, tanpa operator dan bahan bakar)

| Jenis Barang               | Kualitas Barang                     | Responden | Satuan/unit (lingkari kode satuan/unit)<br>(01) 1 BULAN (02) 200 JAM | Nilai sewa per satuan/unit<br>(Rp) | Nama Responden             | Keterangan |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------|--|------------------------------------|----------------------------|------------|
| (1)                        | (2)                                 | (3)       | (4)  | (5)                                | (6)                        | (7)        |
| Excavator PC-200           | Kapasitas bucket 0,8 m <sup>3</sup> | I         | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    | Dinas PU (harga transaksi) |            |
|                            |                                     | II        | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
|                            |                                     | III       | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
|                            | Kapasitas bucket 0,6 m <sup>3</sup> | I         | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    | Dinas PU (harga transaksi) |            |
|                            |                                     | II        | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
|                            |                                     | III       | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
|                            | Kapasitas bucket 0,4 m <sup>3</sup> | I         | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    | Dinas PU (harga transaksi) |            |
|                            |                                     | II        | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
|                            |                                     | III       | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
| Buldozer D-65              | Universal Blade (U-Blade)           | I         | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    | Dinas PU (harga transaksi) |            |
|                            |                                     | II        | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
|                            |                                     | III       | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
|                            | Straight Blade (S-Blade)            | I         | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    | Dinas PU (harga transaksi) |            |
|                            |                                     | II        | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
|                            |                                     | III       | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
|                            | Bowl Dozer                          | I         | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    | Dinas PU (harga transaksi) |            |
|                            |                                     | II        | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
|                            |                                     | III       | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
| Loader (Wheel atau Track ) | Kapasitas bucket 0,8 m <sup>3</sup> | I         | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    | Dinas PU (harga transaksi) |            |
|                            |                                     | II        | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
|                            |                                     | III       | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |



| Jenis Barang               | Kualitas Barang                     | Responden                           | Satuan/unit (lingkari kode satuan/unit)<br>(01) 1 BULAN (02) 200 JAM | Nilai sewa per satuan/unit<br>(Rp) | Nama Responden             | Keterangan                 |  |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| (1)                        | (2)                                 | (3)                                 | (4)  | (5)                                | (6)                        | (7)                        |  |
| Loader (Wheel atau Track ) | Kapasitas bucket 0,6 m <sup>3</sup> | I                                   | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    | Dinas PU (harga transaksi) |                            |  |
|                            |                                     | II                                  | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |                            |  |
|                            |                                     | III                                 | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |                            |  |
|                            |                                     | Kapasitas bucket 0,4 m <sup>3</sup> | I  | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            | Dinas PU (harga transaksi) |  |
|                            |                                     |                                     | II   | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            |                            |  |
|                            |                                     |                                     | III  | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            |                            |  |
|                            | Tandem/Vibrating Roller             | 8 - 10 ton                          | I  | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            | Dinas PU (harga transaksi) |  |
|                            |                                     |                                     | II   | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            |                            |  |
|                            |                                     |                                     | III  | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            |                            |  |
|                            |                                     | kurang dari 8 ton                   | I  | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            | Dinas PU (harga transaksi) |  |
|                            |                                     |                                     | II   | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            |                            |  |
|                            |                                     |                                     | III  | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            |                            |  |
| Dump Truck                 |                                     | Kapasitas 20 ton (tronton)          | I  | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            | Dinas PU (harga transaksi) |  |
|                            |                                     |                                     | II   | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            |                            |  |
|                            |                                     |                                     | III  | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            |                            |  |
|                            |                                     | Kapasitas 12 ton (engkel)           | I  | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            | Dinas PU (harga transaksi) |  |
|                            |                                     |                                     | II   | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            |                            |  |
|                            |                                     |                                     | III  | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            |                            |  |
|                            |                                     | Kapasitas 8 ton (colt diesel)       | I  | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            | Dinas PU (harga transaksi) |  |
|                            |                                     |                                     | II   | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            |                            |  |
|                            |                                     |                                     | III  | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM          |                            |                            |  |
| Motor Grader               | ≤ 100 HP                            | I                                   | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    | Dinas PU (harga transaksi) |                            |  |
|                            |                                     | II                                  | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |                            |  |
|                            |                                     | III                                 | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |                            |  |
|                            | > 100 HP                            | I                                   | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    | Dinas PU (harga transaksi) |                            |  |
|                            |                                     | II                                  | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |                            |  |
|                            |                                     | III                                 | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |                            |  |

| Jenis Barang            | Kualitas Barang | Responden | Satuan/unit (lingkari kode satuan/unit)<br>(01) 1 BULAN (02) 200 JAM | Nilai sewa per satuan/unit<br>(Rp) | Nama Responden             | Keterangan |
|-------------------------|-----------------|-----------|--|------------------------------------|----------------------------|------------|
| (1)                     | (2)             | (3)       | (4)  | (5)                                | (6)                        | (7)        |
| Asphalt Finisher        |                 | I         | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    | Dinas PU (harga transaksi) |            |
|                         |                 | II        | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
|                         |                 | III       | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
| Generator set           | 60 KVA          | I         | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    | Dinas PU (harga transaksi) |            |
|                         |                 | II        | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
|                         |                 | III       | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
| Generator set           | 40 KVA          | I         | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    | Dinas PU (harga transaksi) |            |
|                         |                 | II        | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
|                         |                 | III       | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
| Generator set           | 20 KVA          | I         | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    | Dinas PU (harga transaksi) |            |
|                         |                 | II        | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
|                         |                 | III       | (01) 1 BULAN (02) 200 JAM  |                                    |                            |            |
| <b>JASA KONSTRUKSI</b>  |                 |           |  |                                    |                            |            |
| Upah Kepala Tukang      |                 | I         | O-H  |                                    | Dinas PU                   |            |
|                         |                 | II        |  |                                    |                            |            |
|                         |                 | III       |  |                                    |                            |            |
| Upah Tukang Batu        |                 | I         | O-H  |                                    | Dinas PU                   |            |
|                         |                 | II        |  |                                    |                            |            |
|                         |                 | III       |  |                                    |                            |            |
| Upah Tukang Kayu        |                 | I         | O-H  |                                    | Dinas PU                   |            |
|                         |                 | II        |  |                                    |                            |            |
|                         |                 | III       |  |                                    |                            |            |
| Upah Instalatir Listrik |                 | I         | Titik  |                                    | Dinas PU                   |            |
|                         |                 | II        |  |                                    |                            |            |
|                         |                 | III       |  |                                    |                            |            |
| Upah Pembantu Tukang    |                 | I         | O-H  |                                    | Dinas PU                   |            |
|                         |                 | II        |  |                                    |                            |            |
|                         |                 | III       |  |                                    |                            |            |

<http://bandaacehkota.bps.go.id>

..... Oktober 2015

Mengetahui,  
Kepala BPS Kabupaten / Kota

(.....)  
NIP. ....

# DATA

**MENCERDASKAN BANGSA**



***BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BANDA ACEH***

Jalan Laksamana Malahayati Km 6,5 Desa Baet, Kecamatan Baitussalam  
Telp./Fax. (0651) 8012501 , email: [bps1171@bps.go.id](mailto:bps1171@bps.go.id)  
<http://bandaacehkota.bps.go.id>